



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Menurut WHO, kesehatan adalah kondisi dinamis meliputi kesehatan jasmani, rohani, sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Sehat secara fisik dapat dicapai apabila orang tersebut tidak memiliki gangguan apapun secara klinis. Menurut UU RI No. 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2014, fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yaitu dengan mendirikan fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, klinik, apotek dan lain-lain.

Berdasarkan UU RI No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dimana rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dinyatakan harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan.

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Hal ini diperjelas dengan Permenkes RI No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi



kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan peralatan. Pada pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan sangat diperlukan peran profesionalisme apoteker sebagai salah satu pelaksana pelayanan kesehatan (Depkes RI, 2016).

Selain itu, farmasis bertanggung jawab dalam penjaminan mutu proses penggunaan obat bersama-sama dengan profesi kesehatan lainnya yang bertujuan untuk memperoleh manfaat terapi obat maksimal dan mencegah efek yang tidak diinginkan. Sebagai upaya untuk mewujudkan itu semua, farmasis harus membekali dirinya dengan pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan zaman, memiliki kemampuan analisis yang tepat, kritis terhadap permasalahan yang terjadi, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi serta memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diharapkan dapat menjadi bekal dan persiapan sebelum selanjutnya terjun ke dunia kerja secara nyata dan menjadikan farmasis memiliki kualitas dalam menjalankan pekerjaan kefarmasiannya terutama di rumah sakit, dengan adanya PKPA maka farmasis akan dapat memahami peran dan fungsinya rumah sakit sebagai bukti dedikasi dan pengabdian baik pada instansi rumah sakit dan dalam mendukung peningkatan mutu kesehatan masyarakat.

1.2. Tujuan Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit yaitu:

1. meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit;
2. membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit;



3. memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di rumah sakit;
4. mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional;
5. memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.

1.3. Manfaat Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit yaitu:

1. mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit;
2. mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di rumah sakit;
3. mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di rumah sakit;
4. meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional;
5. mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori seputar dunia farmasi klinis.